



**MELAWAN OLIGARKI TAMBANG BATUBARA DAN
MENAkar KESERiusAN PEMERINTAH DALAM
MENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA**

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.

Guru Besar Hukum Tata Negara

Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Registered Lawyer di Indonesia dan Australia

Jakarta, 28 Desember 2022

- 1. Diskursus Lingkungan Hidup Sebagai Subjek Hukum**
- 2. Pertambangan Minerba Dalam Menopang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia**
- 3. Menguak Permasalahan Tambang di Indonesia**
- 4. Sisi Gelap Elit Politik dalam Pusaran Oligarki Tambang**



Alur Pembahasan

1. Diskursus Lingkungan Hidup Sebagai Subjek Hukum

Bisakah Alam Menjadi Subjek Hukum? Refleksi atas Beberapa Pengalaman di Berbagai Negara



Ecuador's Constitution of 2008

CHAPTER 7. Rights of nature

Article 71

Nature, or Pacha Mama, where life is reproduced and occurs, has the right to integral respect for its existence and for the maintenance and regeneration of its life cycles, structure, functions and evolutionary processes.

All persons, communities, peoples and nations can call upon public authorities to enforce the rights of nature. To enforce and interpret these rights, the principles set forth in the Constitution shall be observed, as appropriate.

The State shall give incentives to natural persons and legal entities and to communities to protect nature and to promote respect for all the elements comprising an ecosystem.

Dari kutipan-kutipan tersebut jelas tergambar bahwa menurut Konstitusi Ekuador, di samping manusia yang berstatus sebagai rakyat, lingkungan hidup juga dapat menjadi pemegang hak dan kekuasaannya sendiri. Hak dan kekuasaan lingkungan itu bersifat sama tingginya.

Bisakah Alam Menjadi Subjek Hukum? Refleksi atas Beberapa Pengalaman di Berbagai Negara



New Zealand Constitution of 2017

Selandia Baru merupakan negara dengan terobosan hukum yang paling maju dalam hal pengakuan hukum atas lingkungan sebagai subjek hukum.

Pada tahun 2017, Selandia Baru membuat terobosan dengan menetapkan sungai Whanganui sebagai subjek hukum melalui legislasi.



- **UUD 1945 sebagai (*green constitution*) Indonesia sangat melindungi hak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian Hak Asasi Manusia**
- **Pasal 28 H Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 menjadi dasar pengakuan (*green constitution*) di Indonesia**

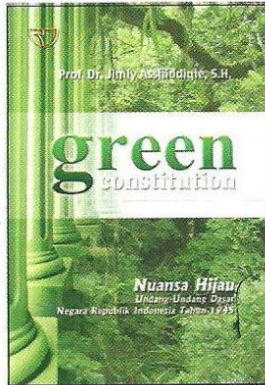
GREEN CONSTITUTION

Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Buku ini unik karena pandangan-pandangannya yang mutakhir mengenai pentingnya konsepsi Konstitusi Hijau dan Ekokrasi. Dengan membaca buku ini, kita akan paham dasar-dasar konseptual persoalan lingkungan hidup dan *sustainable development*. Di samping itu, akan kita temukan relevansi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai *the supreme law of the land* yang menggagas kedaulatan lingkungan dengan konsep demokrasi dan nomokrasi.

Isi buku ini merupakan keresahan penulis terhadap problem lingkungan hidup dewasa ini. Karena itu, tentu saja buku ini penting bagi preferensi bacaan dosen, mahasiswa, para akademisi, pejabat, para aktivis, pegiat LSM, wartawan, dan kelompok media massa, serta masyarakat umum yang punya kepedulian terhadap masa depan lingkungan.



13.5 x 20.5 cm; 222 hlm
ISBN 978-979-769-246-9
Cetakan ke-1, 2009
Rp 40.000,00



2. Pertambangan Minerba Dalam Menopang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Pertambangan Minerba: Menopang Pertumbuhan Ekonomi



Jakarta, CNBC Indonesia - Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertambangan mineral dan batu bara mencatatkan rekor tertingginya. Hingga 10 Desember 2021, tercatat PNBP sektor minerba telah mencapai Rp 70,05 triliun.

Realisasi PNBP ini bahkan telah mencapai 179% dari target 2021 sebesar Rp 39,1 triliun.

Penerimaan Negara Sektor Minerba Tertinggi dalam 5 Tahun

Oleh [Liputan6.com](#) pada 08 Mar 2022, 11:15 WIB

BERITA SATU LIVE

Sri Mulyani Sebut Sektor Minerba Dorong Kenaikan Penerimaan Negara

Selasa, 8 Maret 2022 | 14:57 WIB
Oleh : Triyan Pangastuti / FER



Wow, Setoran Tambang ke Negara Tertinggi Sepanjang Masa!

Wilda Asmarini, CNBC Indonesia
NEWS - Selasa, 21/12/2021 17:40 WIB

f t w h

Dasar Hukum Minerba Pasca Perubahan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU 4/2009;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara; dan
5. Beberapa Putusan MK terkait Minerba.



4 (Empat) Alasan UU Minerba diubah menjadi UU 3/2020:

- a. Melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi;
- b. Memenuhi Kebutuhan Hukum;
- c. Sinkronisasi dengan UU Pemerintahan Daerah;
- d. Rasionalisasi Pasal-Pasal yang tidak implementatif.

Sumber: Walhi, 2021



Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

Bagaimana Indonesia Mengelola Sumber Daya Minerba yang Begitu Melimpah Ini?

Konstitusi pada dasarnya telah mengatur pokok-pokok atau prinsip dasar kebijakan ekonomi termasuk pengelolaan berikut **pemenuhan hak atas ekonomi** dengan mengarahkan negara untuk menyelenggarakan kewajiban sumber daya dan kewajiban kebutuhan akan hak – hak ekonomi dan sosial

PASAL 33 UUD 1945

- (1) Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara;
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas **demokrasi ekonomi** dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Bagaimana Indonesia Mengelola Sumber Daya Minerba yang Begitu Melimpah Ini?

Negara harus hadir dalam menyediakan *“basic goods and services”* untuk warga negaranya.

Keberadaan pertambangan Minerba Indonesia yang melimpah mengharuskan negara untuk masuk ke dalam mekanisme pasar dan memberikan jaminan terpenuhinya hak ekonomi warga negara yang dijamin oleh konstitusi sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi yang dianut. Oleh karenanya UUD sebagai konstitusi tidak hanya merupakan dokumen politik, namun juga dokumen ekonomi.

Penerapan norma konstitusi ekonomi dalam pelaksanaannya harus didasarkan kepada asas – asas berikut:

- (1) asas **tanggung jawab negara** (*state liability*);
- (2) asas **legalitas**, yang memberikan jaminan keadilan, kepastian, dan perlindungan;
- (3) asas **keberlanjutan** (*sustainability*) yang mengakui dan menyadari bahwa sumber daya itu bersifat terbatas dan adanya jaminan untuk dapat dinikmati oleh generasi kini dan yang akan datang; dan
- (4) asas **manfaat**, balik secara ekonomi maupun sosial.



*“Cabang-cabang produksi yang **penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak** dikuasai oleh negara”*

Pasal 33 ayat (2) UUD 1945

*“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk **sebesar-besar kemakmuran rakyat**”*

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

Cabang-Cabang Produksi Strategis Harus Dikuasai Oleh Negara

Apakah Negara sudah melaksanakan mandat Konstitusi melalui pengelolaan Minerba?

Indonesia memiliki tugas besar dengan masih tingginya tingkat kemiskinan di daerah-daerah penghasil tambang, padahal Industri Minerba penyumbang PNPB tertinggi

Batu Bara Masih Jadi Kontributor PNPB Terbesar

MARKET - Rahajeng KH, CNBC Indonesia

29 July 2021 20:38



ESDM Klaim Berhasil Himpun PNPB Rp189 T Sepanjang 2021

CNN Indonesia

Kamis, 17 Feb 2022 19:36 WIB

Bagikan :  

SHARE |

Di Tengah Tantangan Global, ESDM Sumbang Separuh Penerimaan Negara Bukan Pajak

Senin, 7 Januari 2019 | 04:48 WIB | Penulis : DeeWaluyo, Redaktur : Administrator



3. Menguk Permasalahan Tambang di Indonesia

Advokat Jurkani Korban Mafia Tambang

Siaran Pers Denny Indrayana
Presiden Jokowi, Haji Isam, Advokat Jurkani, dan Politik Bisnis Batu Bara
di Kalimantan Selatan

**Tim Advokasi Jurkani Nilai Ada Kejanggalan
dalam Vonis Dua Pelaku Pembunuhan**

Rabu 23 Feb 2022 15:38 WIB
Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Andri Saubani

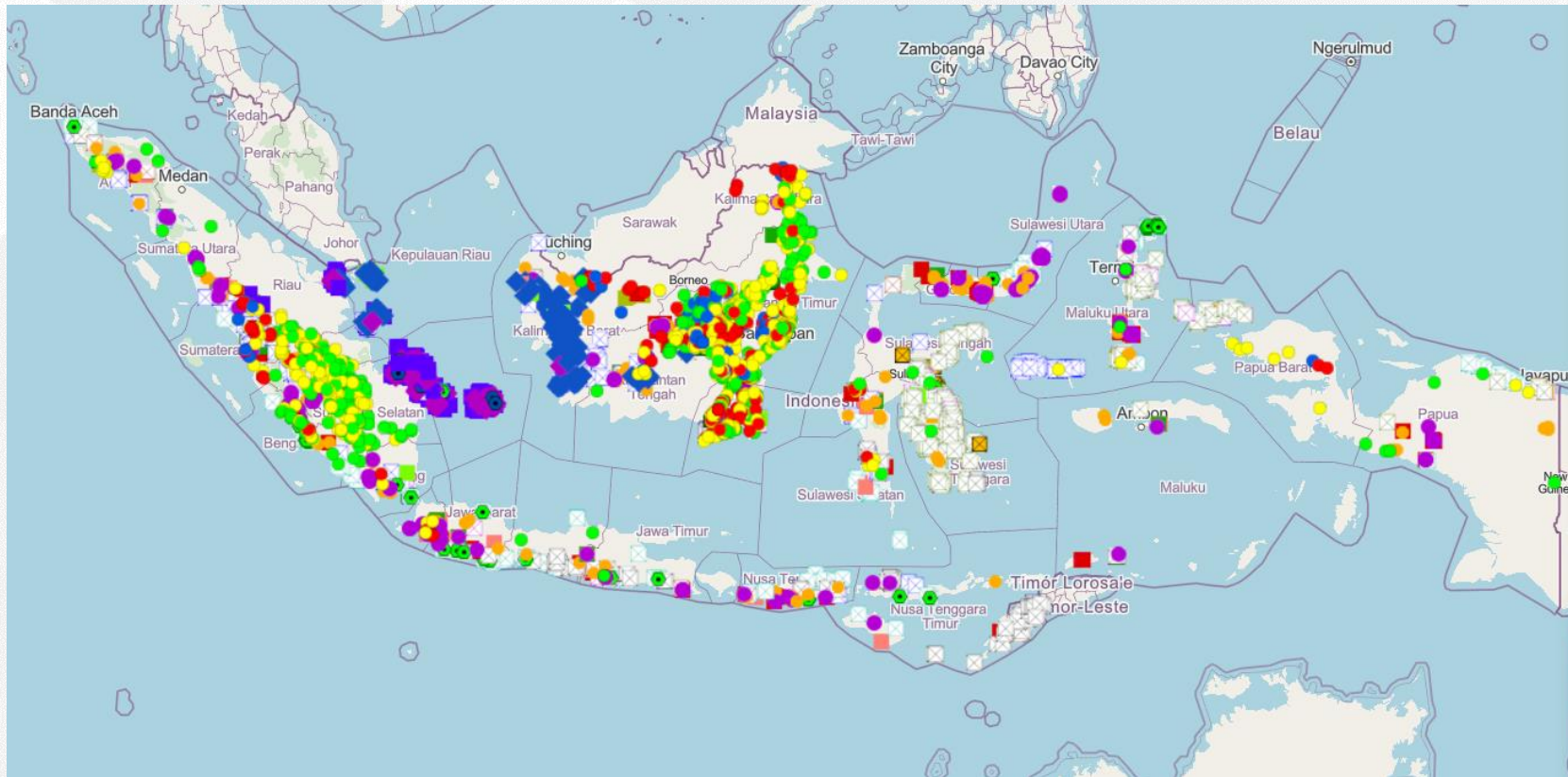


**Advokat di Kalsel, Jurkani, Meninggal
Usai Dibacok, Haji Denny Berduka**

kumparanNEWS
3 November 2021 13:10 - waktu baca 2 menit



Peta Sebaran Potensi Sumber Daya dan Cadangan Mineral Logam dan Batubara



Sumber: geoportal.esdm.go.id

- Indonesia masih **mampu** memproduksi sederet SDA yang dapat diperbaharui maupun tidak, termasuk Minerba hingga saat ini
- Indonesia menduduki **peringkat 1** tambang emas bawah tanah terbesar di dunia dengan kualitas terbaik

Menguak Permasalahan Tambang di Indonesia

- Pulau Kalimantan menjadi salah satu fenomena oligarki tambang di Indonesia.
- Kekayaan alam yang dimiliki oleh pulau Kalimantan menjadikannya **primadona investasi sumber daya alam, terutama pertambangan batu bara.**
- Menurut laporan dalam buku **Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Indonesia Tahun 2021** yang diterbitkan Kementerian ESDM, **pulau Kalimantan menempati wilayah dengan cadangan sumber daya batu bara terbanyak**, berdasarkan sebaran sebagai berikut:

1. Kalimantan Timur : 445
2. Kalimantan Selatan : 224
3. Kalimantan Tengah : 249
4. Kalimantan Barat : 11
5. Kalimantan Utara : 51

Sumber: Kementerian ESDM RI,
<https://drive.esdm.go.id/wl/?id=3ZrZfVSHie1iyE45NpNQ1U4LuPF2fYH5&path=Buku%20Neraca%202021%2007-04-2022.pdf&mode=list&download=1>



Pertambangan Ilegal di Indonesia

- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat terdapat **2.700 tambang ilegal di Indonesia hingga kuartal III 2022**.
- Dari jumlah tersebut, **2.600 lokasi merupakan pertambangan mineral dan 96 lokasi adalah tambang batu bara**.



Normalisasi Penambangan Ilegal

Leluasa Menambang, Ampuh Sultra: Demi Keadilan KSO Basman Harus Diproses

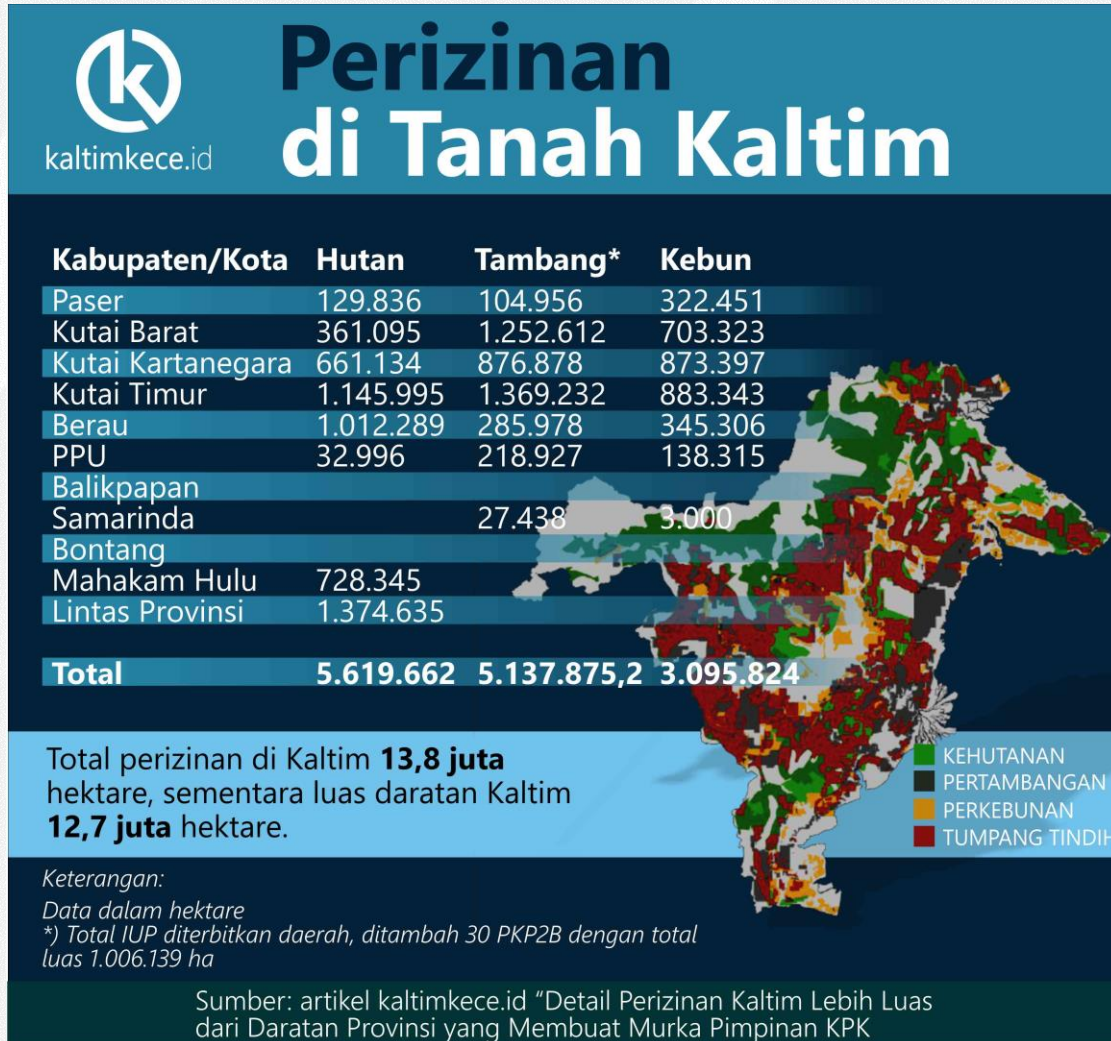


Husnie
May 12, 2022 108 views



- Penambangan ilegal terjadi di wilayah hutan **Blok Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara**. Tanpa adanya IUP dan IPPKH, bebas melakukan penambangan.
- Anehnya, aparat setempat bahkan BUMN yang ada di sana, merasa tidak pernah melihat penambangan ilegal tersebut.
- Hal semacam ini terjadi di daerah lain, seperti di Kalimantan, Maluku, dsb. Seakan penambangan ilegal jauh lebih menarik daripada tambang resmi.

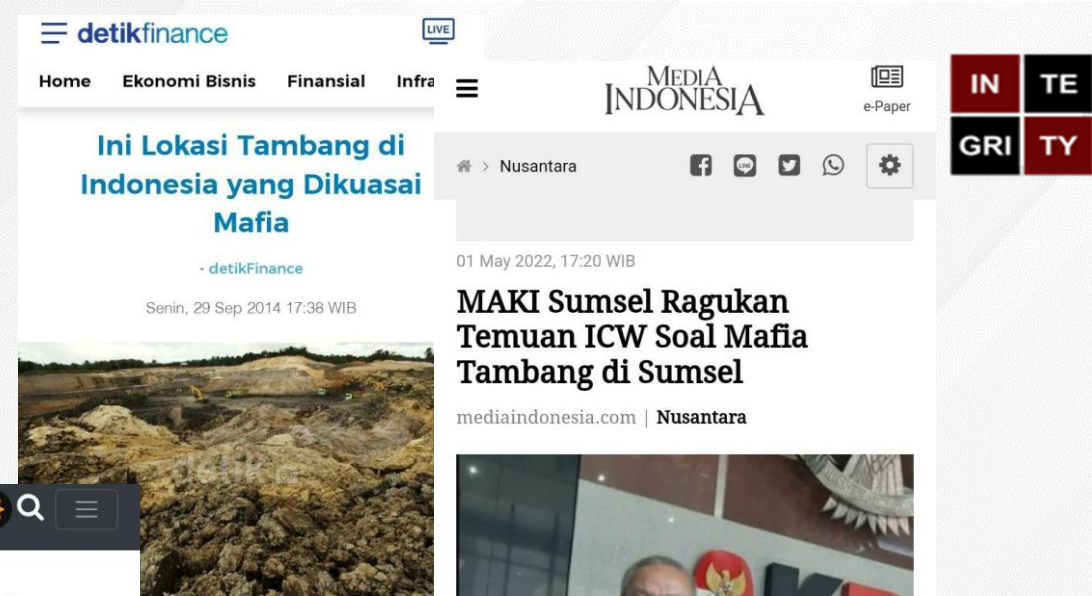
Buah Dari Obral Izin Tambang



- KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) **menyoal perizinan tambang di Kaltim yang lebih besar dari luas daratan provinsi.**
- KPK juga menyoroti lubang tambang yang menyebabkan korban jiwa. Tahun 2019 terdapat 35 nyawa melayang di lubang tambang terhitung sejak 2011. Menurutnya, **hal itu tidak lepas dari dugaan korupsi masa lalu saat proses pertambangan dibiarkan dilakukan dan sulit diungkap.**

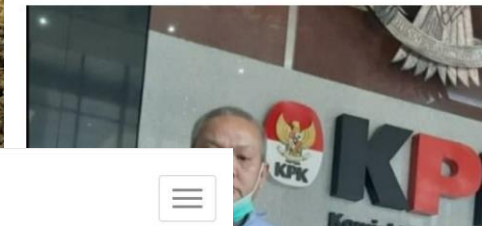
Mafioso Tambang: Masalah yang tak pernah Usai

- Salah satu cara kerja mafia tambang adalah melakukan upaya paksa untuk mengambil perseroan pemilik sah dari Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dengan menggunakan proses hukum yang terlihat *legal* melalui perjanjian-perjanjian yang dibuat. **Model kejahatan ini biasanya disebut *Hostile Take Over*.**
- Para mafia tambang **menggunakan kekuatan dan menjual pengaruh (*trading influence*) orang-orang yang mempunyai **AFILIASI, KEKUASAAN, DAN UANG** dengan pihak berwenang.**



01 May 2022, 17:20 WIB
MAKI Sumsel Ragukan Temuan ICW Soal Mafia Tambang di Sumsel

mediaindonesia.com | Nusantara



rri.co.id

Polda Kaltim Dalam Mafia Tambang Dengan Sebutan Ratu Batu Bara

Bagikan :



Desak Oknum Polri yang Diduga Terlibat Mafia Tambang Sumsel Diperiksa, IPW: Ini Sudah Menahun



LAPORAN: AGUS DWI
Senin, 30 Mei 2022, 03:33 WIB



KPK, Polri, Dan Kejaksaan Diminta Turun Tangan Berantas Praktik Mafia Tambang

Penulis : BHAYU AJI PRIHARTANTO
Editor : OKTAVIAN SURYA DEWANGGA

Nasional



Rabu, 4 Mei 2022 17:16 WIB

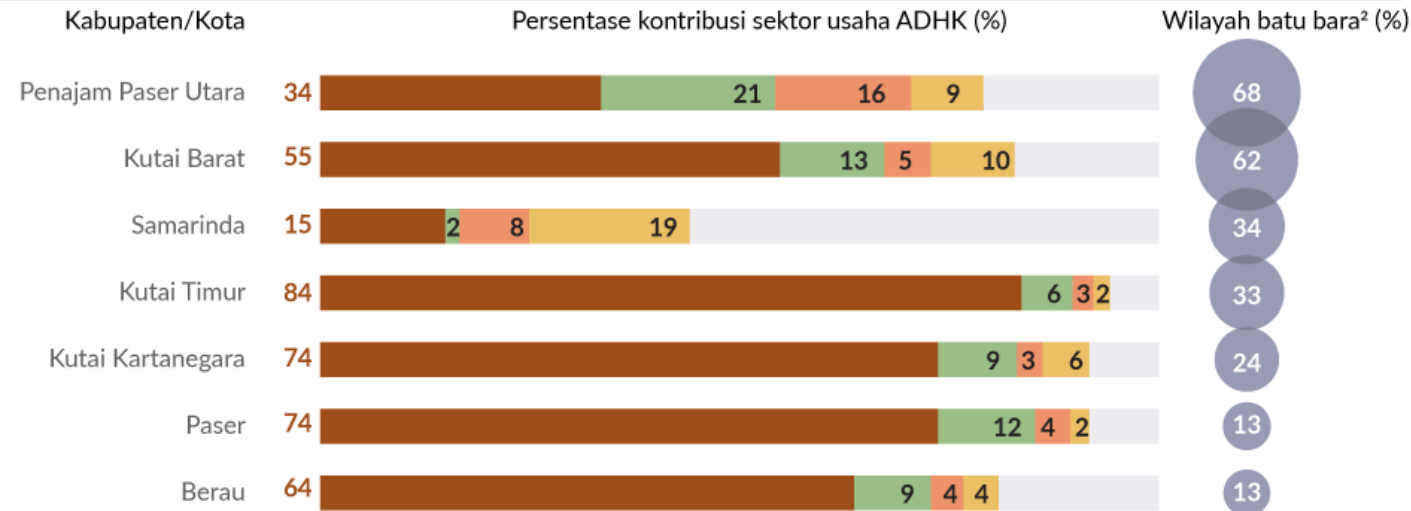


Foto: Ist.

PDRB¹ menurut sektor usaha di 3 provinsi (Kalimantan Timur, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan)

■ Pertambangan dan Penggalian
 ■ Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
 ■ Industri Pengolahan
 ■ Konstruksi
 ■ Lainnya

Provinsi Kalimantan Timur



Lainnya: Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Informasi dan Komunikasi; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Lainnya; Jasa Pendidikan; Jasa Perusahaan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Pengadaan Listrik dan Gas; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Perdagangan Besar dan Eceran; Real Estate; Transportasi dan Pergudangan.

¹ Data PDRB tahun 2016

² Rasio terhadap luas wilayah Kabupaten/Kota

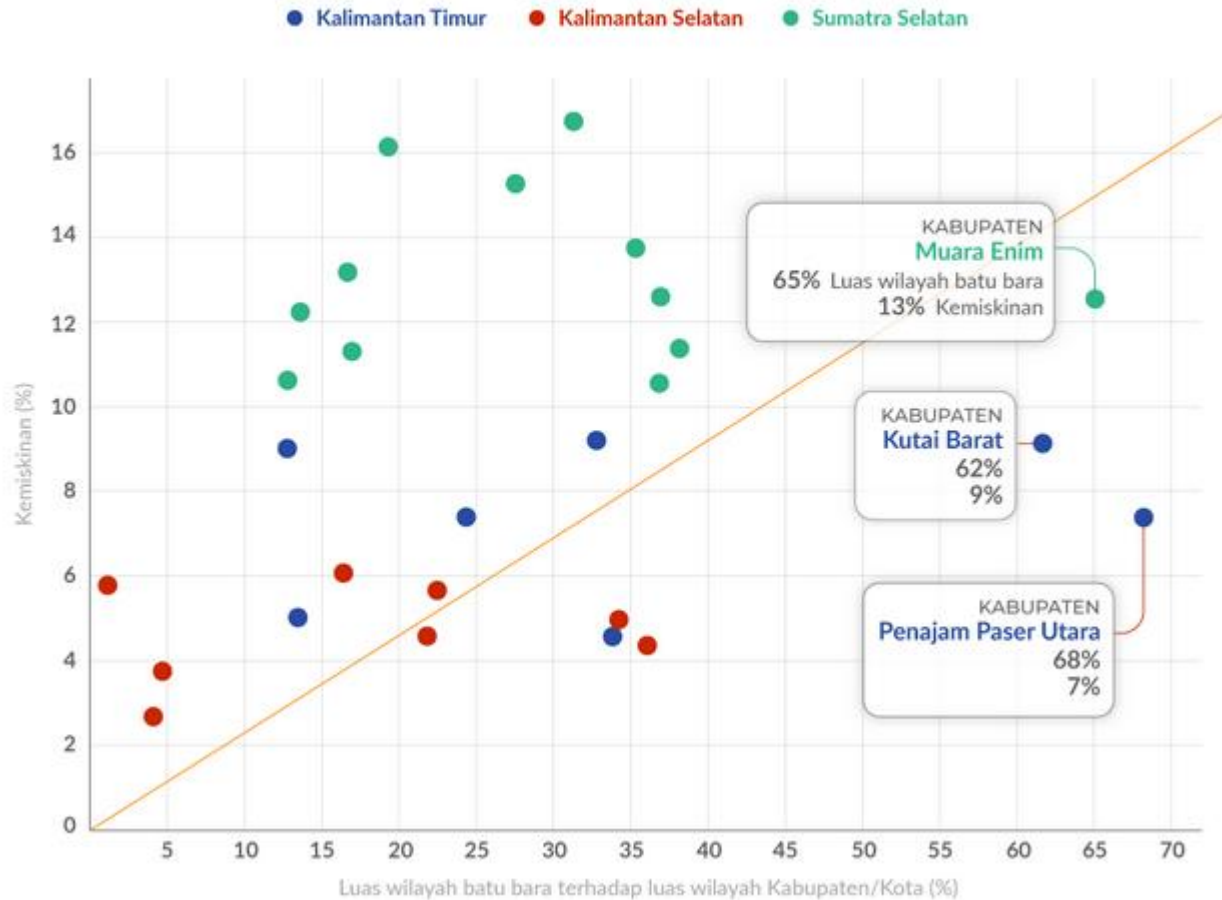
Sumber: Badan Pusat Statistik, BPS & Extractive Industries Transparency Initiative, EITI (diolah)

lokadata
Oleh Beritagar.id

ANOMALI KEMISKINAN DI WILAYAH TAMBANG BATU BARA

Sumber: BPS & Extractive Industries Transparency Initiative, EITE (diolah), <https://beritagar.id/artikel/berita/anomali-kemiskinan-di-wilayah-tambang-batu-bara>,

Angka kemiskinan di wilayah batu bara, 2018

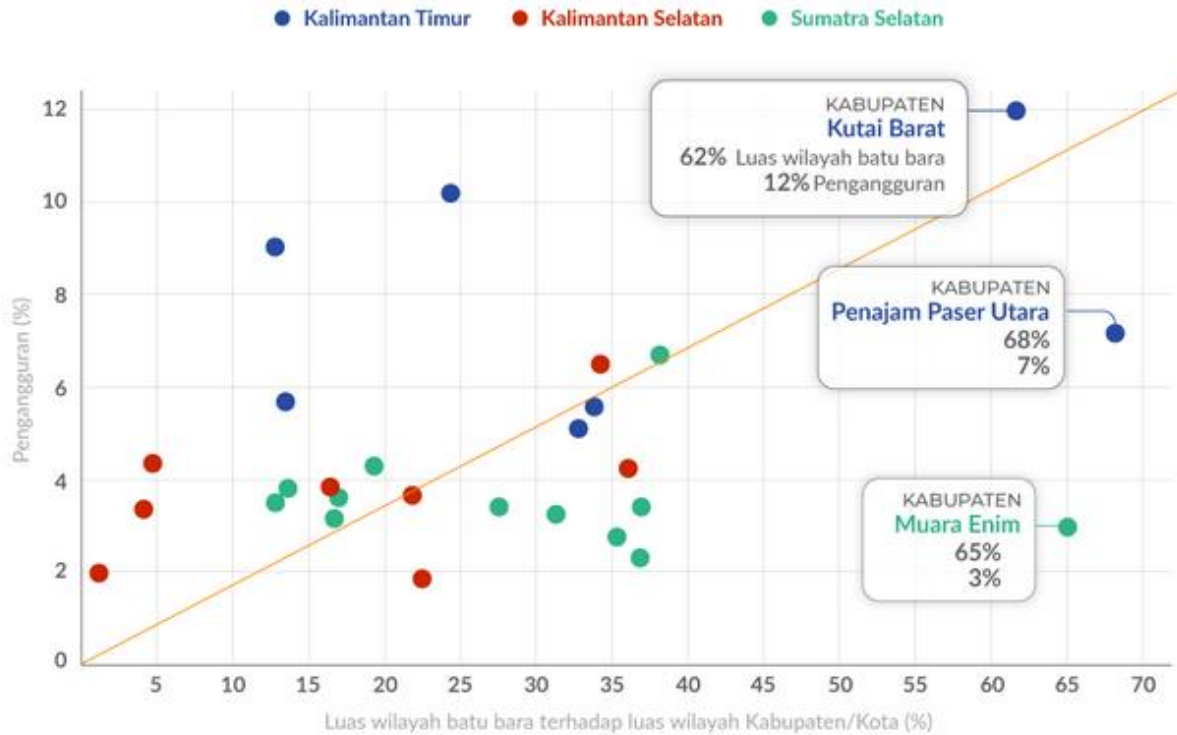


ANOMALI KEMISKINAN DI WILAYAH TAMBANG BATU BARA

Dari tiga provinsi di atas, angka kemiskinan tertinggi tercatat di Sumsel (**13,39 persen**), disusul Kaltim (**6 persen**), kemudian Kalsel (**4,5 persen**).

Sumber: BPS & Extractive Industries Transparency Initiative, EITE (diolah), <https://beritagar.id/artikel/berita/anomali-kemiskinan-di-wilayah-tambang-batu-bara>, 31 Juli 2019

Angka pengangguran di wilayah batu bara, 2018



Sumber: Badan Pusat Statistik, BPS & Extractive Industries Transparency Initiative, EITI (diolah)

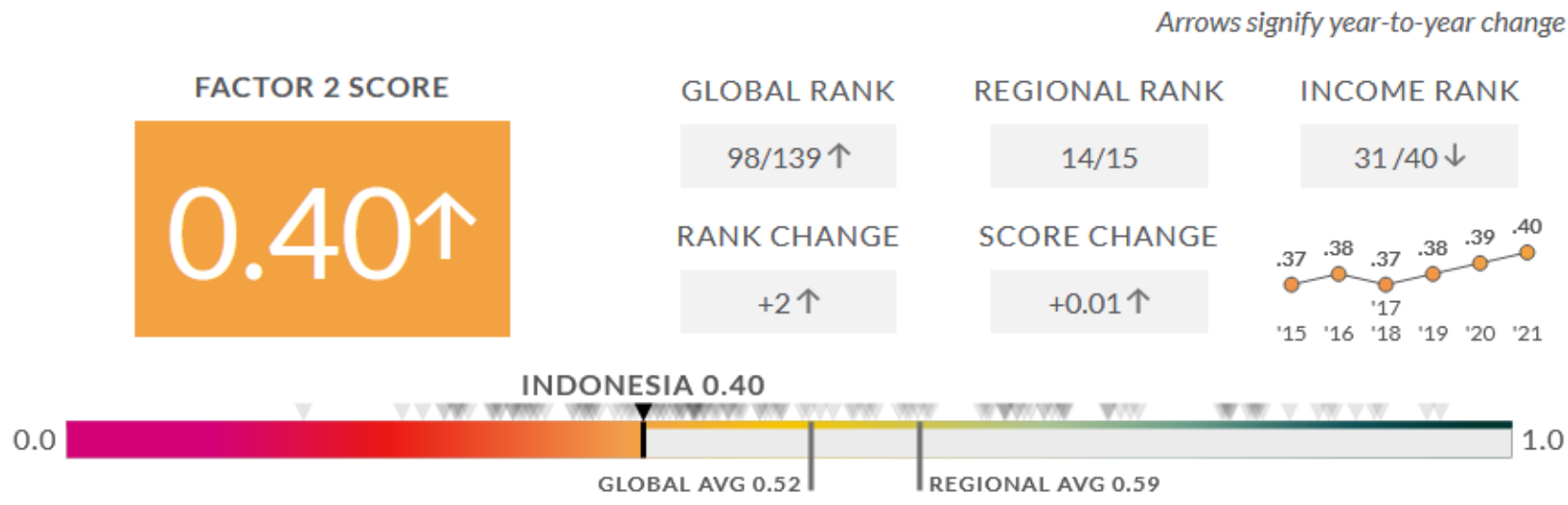
lokadata
Oleh Beritagar.id

Sumber: BPS & Extractive Industries Transparency Initiative, EITE (diolah), <https://beritagar.id/artikel/berita/anomali-kemiskinan-di-wilayah-tambang-batu-bara>

Angka kemiskinan tertinggi tercatat di Kutai Timur, Kalimantan Timur. **Padahal sepertiga wilayahnya adalah area tambang batu bara.** Sementara di Kalsel, angka kemiskinan tertinggi ada di **Tabalong, yang 15 persen wilayahnya adalah tambang batu bara.**

4. Sisi Gelap Elit Politik dalam Pusaran Oligarki Tambang

2 | Absence of Corruption for Indonesia, 2021

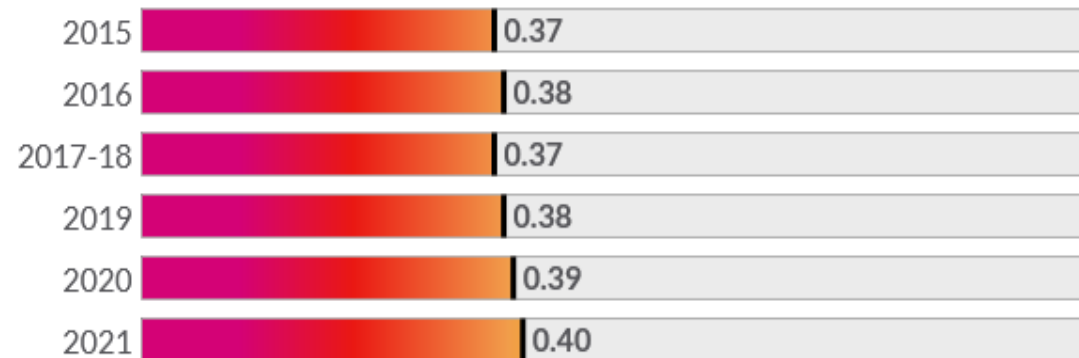


Overview Absence of Corruption for Indonesia 2021

- Peningkatan 0.01 dalam 7 tahun
- Index berada jauh dibawah rata-rata regional
- Korupsi masih menjadi faktor yang memprihatinkan

FACTOR 2 | Absence of Corruption for Indonesia, 2015 - 2021

Indonesia scores for Absence of Corruption from 2015 to 2021. (Use the left menu to explore other scores.)



CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX

2021

Q

Score	Country	Rank
38	Indonesia	96

ASIA PACIFIC

INDONESIA

Score
38/100 [What does the CPI score mean?](#)

Rank
96/180

Score change
 +1 since 2020

Score changes 2012 - 2021

Year	Score
2012	32
2013	32
2014	34
2015	36
2016	37
2017	37
2018	38
2019	40
2020	37
2021	38

Indonesia Corruption Perceptions Index 2021

- Nilai CPI 38/100.
- Peringkat 96/180 Negara.
- Peningkatan korupsi yang selalu meningkat signifikan.

Sumber: Transparency International, <https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/idn>

Korupsi Sektor Pertambangan

Kejati sebut kerugian negara akibat korupsi tambang PT Toshida **Rp190 miliar**

© Rabu, 16 Juni 2021 12:39 WIB

LIPUTAN KHUSUS:

AHLI: Korupsi Tambang terus Gerus Kocek Negara

Penulis : Tim Betahita

Kerugian negara juga terjadi pada sisi investasi dan penyerapan tenaga kerja.

Permainan para Political Exposed Persons (PEP) dalam dunia “PERTAMBANGAN”

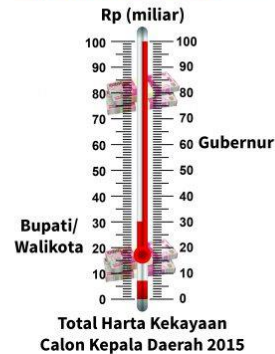
IJON POLITIK PILKADA

Hingga saat ini, praktek ijon politik terus berlangsung antara pelaku bisnis dan politisi dalam penyelenggaraan Pilkada. Para pebisnis menunggangi dan mengendalikan para kandidat Kepala Daerah melalui pembiayaan pencalonan dan kampanye (modal finansial) dan para kandidat menebusnya dengan jaminan politik untuk pemberian ataupun pengamanan konsesi perizinan.

Hubungan (Calon) Kepala Daerah dengan Pelaku Usaha



Biaya Politik PILKADA 2015



Kualitas Kampanye [?]

Saya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, menyediakan infrastruktur, dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Isu krisis tentang menyempitnya ruang hidup, terancamnya tradisi dan kearifan lokal masyarakat mana Pak?



- Fenomena **ijon politik**, di mana terjadi **transaksi jahat antara politisi sebagai Political Exposed Persons dan partai politik dengan pelaku bisnis yang sama-sama berkepentingan dan terjadi di ruang gelap, tanpa pantauan publik.**
- Pada tahun politik 2017-2018, terdapat **171 SK izin tambang yang dikeluarkan oleh para kepala daerah, antara lain:**
 - (1) Jawa Tengah (120 IUP),
 - (2) Jawa Barat (34 IUP),
 - (3) Sumatera Selatan (3 IUP),
 - (4) Lampung (3 IUP),
 - (5) NTT (3 IUP),
 - (6) Sulawesi Tenggara (4 IUP), dan beberapa daerah lainnya.

Lisensi Yang Koruptif Dan Pembiaran Atas Ketidakpastian Hukum

1. Perizinan tambang masih menjadi ceruk perilaku KKN lintas instansi;
2. Dihilangkannya upaya hukum Fiktif Positif ke PTUN, membuat pemerintah semakin *superior* terhadap pengabaian permohonan perizinan “sektor pertambangn”. Berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum; dan
3. Tumpang tindih perizinan dan ketidakjelasan penanggung jawab (pemegang hak) di sebuah WIUP, menjadi pintu masuk menjamurnya penambangan ilegal.



DUITokrasi Kills Indonesian DEMOcracy

- Masalah hukum pertambangan dalam sistem ketatanegaraan tidak dapat dilepaskan dari isu duitokrasi yang melahirkan lingkaran oligarki politik.
- **Lingkaran oligarki politik** ini kemudian akan mensponsori **figur pemimpin untuk dikendalikan**, serta menjadi **akar *candidacy buying dalam*** Pemilihan Umum hingga Pemilihan Kepala Daerah.

IN TE GRI TY **CONSTITUTIONAL DISCUSSION #7**

BEDAH BUKU
PILKADA DAN TAMBANG
OLIGARKI YANG MAKIN MENGUAT

Pembicara :

- Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Guru Besar Hukum Tata Negara / Senior Partner INTEGRITY Law Firm
- Dr. Muhammad Uhaib As'ad, M.si.
Penulis
- Kisworo Dwi Cahyono
Direktur Eksekutif WALHI Kalsel

GRATIS

Kampung Buku
Jalan Sultan Adam, Kayutangi,
Banjarmasin
Off line dan zoom
Doorprize 5 buku

Jumat, 24 Juni 2022
19.30 WITA - SELESAI
Link Pendaftaran
www.integritylawfirm.id/ICD7
Link zoom dan live streaming
Youtube INTEGRITY

Oligarch: Penguasa berpilin
dengan pengusaha

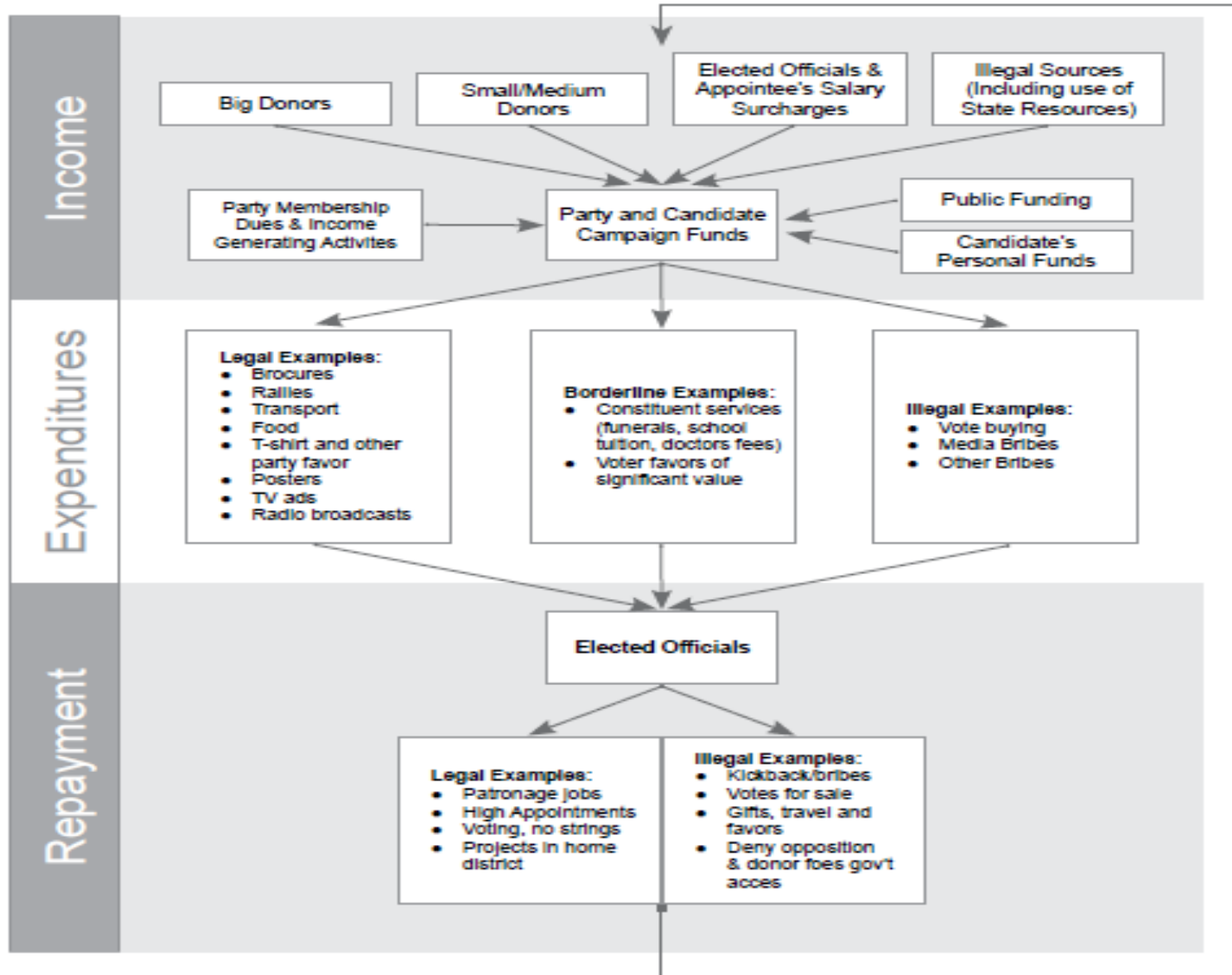
Parpol yang Koruptif

Media yang Terkooptasi

Oknum Aparat Keamanan

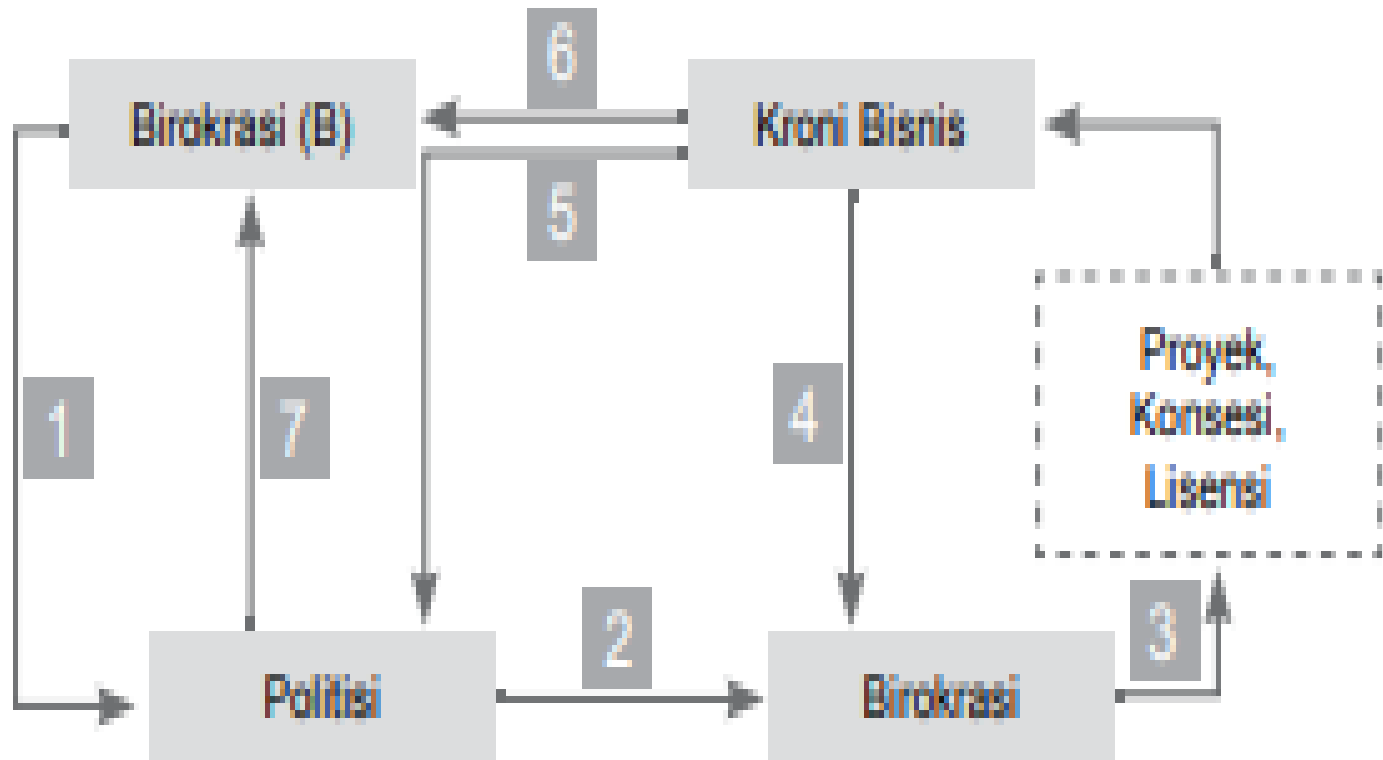
The Real Power Holders

HOW MONEY CAN INFLUENCE POLITICS



Source: Duschinsky

Lingkaran Setan Korupsi Politik



Keterangan:

1. Nominasi
2. Politisasi Birokrasi
3. Kontrak, konsesi, lisensi
4. Suap, kickback
5. Sumbangan Pemilu, Suap
6. Sumbangan Pemilu, *candidacy buying*
7. Setoran ke Partai



INTEGRITY Programs

- INTEGRITY Scholarship
- INTEGRITY Constitutional Discussion
- INTEGRITY Legal Training
- INTEGRITY Legal Update
- INTEGRITY Client Alert
- INTEGRITY Constitutional Advocacy

INTEGRITY
LEGAL ADVOCACY TRAINING
"MEMBANGUN SISTEM ANTIKORUPSI DI KORPORASI"

NARASUMBER **KEYNOTE SPEAKER**

HARI KE 1 - 28 SEPTEMBER 2021
 PUKUL 10.00 - 15.00 WIB

SESI I
 Ganjar Lukmanasa, S.H., M.H.
 ANK Hakim Pidana Univ. Indonesia

SESI II
 Dr. Yusuf Husein, S.H., LL.M.
 Kepala PPATK Tahun 2002-2011
 Ketua STIR - Jakarta

HARI KE 2 - 29 SEPTEMBER 2021
 PUKUL 10.00 - 15.00 WIB

SESI III
 Prof. Desny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
 Senior Partner INTEGRITY Law Firm

SESI IV
 Adnan Pandu Praja, S.H., Sp.N., LL.M.
 Wakil Ketua KPK (2011-2015)
 Associate Vice Integrity

SESI V
 Febri Dianayah, S.H.
 Managing Partner Vice Integrity Law Office

SESI VI
 Irene Putri, S.H., M.Hum.
 Kepala Subdirektorat Tindakan Hukum Lain &
 Pelayanan Hukum pada Direktorat
 Pembinaan Hukum JAMADOTOR KEJAGUNG

WAKTU PELAKSANAAN
 Zoom Meeting
 Selasa - Rabu, 28-30 September 2021
 Pukul 10.00 WIB - 13.00 WIB

FASILITAS

- Sertifikat
- Sesiology Materi Legal Training
- Donorship Buku dari Pemerintah

MATERI TRAINING

SESI I

1. Memahami Tidak Polusi Korupsi Berhak Korporasi
2. Memahami Tidak Polusi Persewaan yang Berhak Korporasi

SESI II

1. Strategi Pencegahan Korupsi dan Persewaan yang Berhak Korporasi
2. Memahami Perjanjian dan Persewaan yang Berhak Korporasi
3. Memahami Perjanjian Bersejarah dan Persewaan

SESI III

1. Penemuan Good Corporate Governance bagi Korporasi
2. Studi Kasus Implementasi Good Corporate Governance

SESI IV

1. Membangun Sistem Antikorupsi di Korporasi
2. Menemukan Persewaan yang Berhak Korporasi Sistem Manajemen Anti-Persewaan (SMAP)
3. Menemukan Persewaan Internal Korporasi Melalui Persewaan WSL 303 FISC (Defining Management System)

BIAYA TRAINING
 Rp. 3.000.000,- Full Paket Materi
 Rp. 500.000,- Full Paket Materi (Sertifikat dan Donorship 3 Buku)

NO. REKENING PEMBAYARAN
PERMATA BANK STABARAH
 0111000009
 KCS PO INDAH WIN INTEGRITY

Pendaftaran dibuka sampai dengan 25 September 2021
 melalui link <https://integritylawfirms.com/australia/>

NARAHUBUNG Abdulrahman Zainal : 0821 2535 2688

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION
PHK & ISU KETENAGAKERJAAN DI TENGAH
PANDEMI COVID-19: Antisipasi & Solusi Hukumannya

NARASUMBER

Prof. Desny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
 Drs. Indah Anggraeni Putri, M.Hum.
 Faisal H. Saad, S.E., M.A.

MODERATOR
 Kurnia, 12 Agustus 2021
 Live on Zoom, 13.00 - 16.00 WIB

DAFTAR SEKARANG!
 Link Pendaftaran: integritylawfirms.com/australia/

FREE

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #2
URGENSI AMANDEMEN KONSTITUSI DI TENGAH PANDEMI:
UNTUK KEPENTINGAN SIAPA?

KEYNOTE SPEAKER **NARASUMBER**

Moh. Mahfud MD
 Wakil Ketua MKWU RI

Yudi Latief
 Ketua PIR Indonesia

Arul Sami
 Wakil Ketua MKWU RI

MODERATOR

Wahyuni Susanti
 Associate CTR - Jakarta

Desny Indrayana
 Vice Senior CTR
 Senior Partner INTEGRITY Law Firm

FREE REGISTRASI!
 Link Pendaftaran: integritylawfirms.com/australia/
 Tersedia e-certificate

Kurnia, 30 Agustus 2021
 Pukul 13.00 WIB - Selesai
 Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm

NARAHUBUNG
 Fahry Simanungkalang : 0811000007127

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #3
PRO-KONTRA TIGA PERIODE MASA JABATAN PRESIDEN

KEYNOTE SPEAKERS **NARASUMBER**

Desny Indrayana
 Senior Senior CTR
 Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Moh. Thohari
 Pengasah Asesorial dan Pro-
 Rencana Rancangan Ulang Perundang-
 undangan

Rafly Harun
 Pakar Hukum Tata Negara

MODERATOR

Rahma Izza Nurrahma
 Senior Associate CTR - Jakarta

Titi Anggrani
 Senior Partner PIR Jakarta

Titi Lindawati
 Professor International Law School
 Universitas Indonesia

Agenda, 17 September 2021
 Pukul 13.30 WIB - Selesai
 Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm

FREE REGISTRASI!
 Link Pendaftaran: integritylawfirms.com/australia/

NARAHUBUNG
 Fahry Simanungkalang : 0811000007127

<https://integritylawfirms.com/australia/>





<https://www.integritylawfirms.com>

LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH



LAWYERS

Melbourne Office:

Level 31 & 50, 120 Collins Street
Melbourne, Victoria 3000, **AUSTRALIA**
+61 3 85184708

Jakarta Office:

Citylofts Sudirman, 8th Floor, Suite 825
Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta, **INDONESIA**
+62 21 2555 8836